

STANDAR AKUNTANSI: KAJIAN KRITIS *PRINCIPLE-BASED VERSUS RULE-BASED*

Krismiaji

Akademi Akuntansi YKPN

Email: *xmiaji@gmail.com*

ABSTRAKSI

Standar akuntansi yang dihasilkan sampai dengan awal abad 20 cenderung mendasarkan pada aturan rinci (rule-based), yang membuat para pengguna merasa nyaman. Namun seiring perkembangan dalam dunia bisnis, berbagai kecurangan akuntansi yang terjadi memaksa pembuat aturan menerbitkan sarbanes oxley act of 2002, yang dalam pasal 108 menginstruksikan SEC untuk mempelajari kemungkinan penerapan principle-based dalam penyusunan standar akuntansi. Hasil kajian kritis terhadap kedua perubahan pendekatan dari rule-based menjadi principles-based dalam penyusunan standar akuntansi di Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Pertama, pada dasarnya standar akuntansi yang selama ini dibuat oleh FASB sebagian sudah memiliki sifat principle-based, namun sebagian lagi memiliki sifat rule-based. Kedua, standar akuntansi yang memiliki sifat rule-based diyakini tidak mengandung prinsip atau mengandung prinsip yang keliru, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dengan menggunakan pedoman implementasi dan sejenisnya. Ketiga, principle-based mengandung kelemahan utama yaitu tidak bisa menghasilkan statemen keuangan yang memiliki daya banding dengan perusahaan lainnya dan cenderung tidak konsisten. Keempat, dari sudut pandang akuntan, ternyata para akuntan lebih menyukai rule-based karena mereka dapat terhindar dari upaya tuntutan hukum sebagai akibat judgment yang salah dalam pelaporan keuangan. Kelima, upaya untuk berpindah dari rule-based ke principle-based tidak dapat berjalan dengan lancar, karena konstituen FASB masih menghendaki agar FASB membuat pedoman implementasi

Kata kunci: rule-based, principle-based, standar akuntansi.

1. TUJUAN

Tujuan paper ini adalah melakukan kajian kritis tentang standar akuntansi berbasis prinsip (*principle-based*) yang diterapkan dalam *International Financial Reporting Standard* (IFRS) dan *Statement of Financial Accounting Standard* (SFAS) akhir-akhir ini dan membandingkannya dengan standar akuntansi berbasis aturan (*rule-based*). Kajian ini terutama dikaitkan dengan pengaruh kedua basis tersebut terhadap pelaporan keuangan. Paper ini akan diawali dengan penjelasan *concise* tentang standar akuntansi, dilanjutkan dengan uraian tentang latar belakang perubahan basis standar

akuntansi dari *rule-based* menjadi *principle-based*. Pembahasan dilanjutkan dengan kajian kritis pengaruh perubahan basis standar tersebut terhadap pelaporan keuangan perusahaan. Pada akhirnya, paper ini akan diakhiri dengan simpulan.

2. STANDAR AKUNTANSI

Standar akuntansi adalah pedoman yang digunakan dalam praktik akuntansi sehingga output dari proses akuntansi yaitu statemen keuangan dipahami dan diterima secara umum oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Standar akuntansi merupakan produk yang dihasilkan oleh sebuah badan penyusun standar akuntansi. Kebutuhan standar itu sendiri muncul karena perusahaan dimiliki oleh banyak orang, sehingga pengelola perusahaan harus mempertanggung jawabkan pengelolaan perusahaan tersebut kepada para pemilik dengan menggunakan media atau instrumen berupa statemen keuangan.

2.1. Pentingnya Standar Akuntansi

Pada dasarnya, akuntansi adalah sebuah sistem yang mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. (Kieso, 2006). Akuntansi keuangan adalah proses yang berujung pada pembuatan laporan keuangan (*financial reports*) perusahaan untuk digunakan baik oleh para pengguna intern maupun pengguna ekstern. Agar semua pihak yang berkepentingan baik penyusun laporan, pengguna, dan pihak lain memiliki pemahaman yang sama tentang informasi yang dilaporkan, maka dibutuhkan sebuah standar akuntansi.

Menurut Keiso (2006), kontroversi utama dalam penetapan standar akuntansi adalah, "*whose rules should we play by, and what should they be?*". Jawaban atas pertanyaan ini tidak sederhana karena para pengguna statemen akuntansi keuangan memiliki beragam kebutuhan informasi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kewajiban pelaporan, perusahaan membuat seperangkat laporan tunggal yang disebut "*general-purpose financial statements*". Para pengguna mengharapkan laporan tersebut menyajikan secara jelas, fair, dan lengkap tentang operasi keuangan perusahaan.

Profesi akuntansi telah berupaya untuk mengembangkan serangkaian standar yang berterima umum dan secara universal dipraktikkan, sehingga perusahaan tidak perlu mengembangkan sendiri standar akuntansinya. Pembaca laporan keuangan harus memiliki pemahaman yang memadai tentang berbagai istilah teknis akuntansi yang digunakan sehingga dapat membaca dan memahami informasi akuntansi yang tersaji dalam statemen keuangan. Serangkaian standar dan prosedur umum tersebut dikenal dengan istilah *generally accepted accounting principle (GAAP)* atau prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU). Pihak pihak yang terlibat dalam pengembangan standar akuntansi adalah:

1. Di Amerika Serikat, mencakup Securities and Exchange Commission (SEC), American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Accounting Standards Board (FASB), dan Government Accounting Standard Board (GASB)
2. Di Indonesia, standar akuntansi disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).
3. Di Internasional, standar akuntansi disusun oleh International Accounting Standards Boards (IASB).

Dalam paper ini pembahasan hanya akan dibatasi pada standar akuntansi yang dihasilkan oleh badan penyusun standar akuntansi Amerika Serikat saja dengan pertimbangan: (1) DSAK sedang

dalam proses melakukan konvergensi standar akuntansi internasional; (2) IASB belum selesai menyusun kerangka konseptual yang akan melandasi pengembangan standar akuntansi internasional; (3) Standar akuntansi Amerika Serikat adalah standar akuntansi yang paling *established* dan selama ini digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar akuntansi di Indonesia. Untuk menghasilkan standar akuntansi yang berkualitas, memenuhi kebutuhan para pengguna, sistematis, dan memiliki dasar serta argumentasi yang kuat, dibutuhkan sebuah acuan yang dikenal dengan kerangka konseptual.

2.2. Rerangka Konseptual

Dalam konteks standar akuntansi, kerangka konseptual seperti layaknya sebuah konstitusi. *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 8 (FASB, 2010)*, mendefinisikan kerangka konseptual sebagai berikut:

The Conceptual Framework is a coherent system of interrelated objectives and fundamental concepts that prescribes the nature, function, and limits of financial accounting and reporting and that is expected to lead to consistent guidance. It is intended to serve the public interest by providing structure and direction to financial accounting and reporting to facilitate the provision of unbiased financial and related information. That information helps capital and other markets to function efficiently in allocating scarce resources in the economy and society.

Para praktisi meyakini bahwa kontribusi FASB dalam pengembangan standar akuntansi sangat tergantung pada kualitas dan utilitas kerangka konseptual. Oleh karena itu, kerangka konseptual merupakan sebuah upaya untuk memberikan sebuah struktur metateoritis bagi akuntansi keuangan (Wolk, 1997). Alasan diperlukannya kerangka konseptual antara lain: (1) Agar bermanfaat, harus dibangun *standard setting* dan dihubungkan dengan *the body of concepts and objectives* yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, kerangka konseptual yang telah ditetapkan secara baik harus memungkinkan FASB untuk membuat standar yang bermanfaat dan konsisten dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan kerangka konseptual tersebut dapat dihasilkan serangkaian standar dan aturan akuntansi yang koheren. Kerangka ini harus menaikkan pemahaman para pengguna *statement of financial position* dan keyakinan dalam pelaporan akuntansi. Kerangka ini juga harus mampu meningkatkan keterbandingan antar *statement of financial position* perusahaan. (2) Profesi akuntansi harus mampu untuk secara cepat menyelesaikan persoalan-persoalan praktik yang baru atau sedang berlangsung dengan mengacu pada sebuah *existing framework of basic theory*.

Menurut Solomon (1986) kerangka konseptual telah sejalan dengan konstitusi dalam arti bahwa alternatif-alternatif terhadap kerangka tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari hukum atau berada di luar hukum. Pendekatan konstitusional jelas tidak memberikan struktur logika yang sekuat pendekatan fondasional. Meskipun demikian, kerangka konseptual bukan merupakan sebuah *legally binding instrument*, dan juga tidak berisi elemen *arbitrary* sebagaimana sebuah konstitusi. Dalam pandangan Solomon, sebuah kerangka konseptual tidak memiliki ruang untuk hal-hal yang bersifat tidak pasti (*arbitrariness*).

Penyusunan standar oleh FASB telah dijustifikasi pada *codificational grounds*. Kodifikasi adalah sebuah justifikasi proses penyusunan standar itu sendiri dan bukan standar individu yang dihasilkan dari proses tersebut. Pendekatan kodifikasi dipandang sebagai pendekatan yang rasional dan sebagai sebuah *good reason* untuk pemilihan standar akuntansi meskipun standar yang dipilih bukanlah merupakan standar terbaik. Kodifikasi dapat juga dipandang sebagai sebuah proses.

Pemilihan standar melalui sebuah proses yang rasional berarti bahwa standar tersebut dapat diubah atau diperbaiki di masa mendatang jika kondisinya memang menghendaki.

Dari sudut pandang kodifikasional, sebuah kerangka konseptual memberikan penalaran yang baik karena kerangka tersebut dapat mendukung dan mendorong sifat rasional proses tersebut. Gaa (1988) memandang kerangka konseptual sebagai *embodying aspect of both a constitution and a theory*. Pandangan konstitusional Gaa berbeda dengan pandangan Solomon yang lebih legalistik. Bagi Gaa (1988), pertanyaan tentang siapa yang memperoleh manfaat dari informasi keuangan ikut dilibatkan. Pada SFAC No. 1 telah dijabarkan bagaimana mengatasi heterogenitas pengguna informasi keuangan melalui tujuan memberikan informasi keuangan yaitu *useful to present and potential investors and creditors and other external users who have a reasonable understanding of business and economic activities*. Gaa (1988) juga berpandangan bahwa kerangka konseptual memiliki aspek teoritis karena kerangka tersebut memberikan kriteria bagi pemilihan ketika mengevaluasi alternatif akuntansi, dengan melibatkan faktor-faktor seperti relevan, reliabilitas, dan kendala manfaat/biaya. Kriteria ini membantu atau memandu FASB, namun tidak menjamin hasil terbaik meskipun pedoman konstitusional untuk informasi tersebut berguna bagi investor dan kreditor sekarang maupun calon investor dan kreditor, dan juga pengguna lainnya. Sesuai pandangan kodifikasional, tidak hanya standar yang dapat diperbaiki namun juga kerangka konseptual itu sendiri juga merupakan subyek bagi koreksi dan perubahan. Hal ini terbukti dengan digantikannya SFAC No. 1 dan SFAC No. 2 yang telah berusia 30 tahun dengan SFAC No. 8 yang dirilis pada bulan September 2010.

2.3. Konsep Dasar

Sebagian besar konsep-konsep akuntansi mempengaruhi aturan-aturan akuntansi. Konsep-konsep tersebut umumnya mengalami evolusi karena adanya kebutuhan praktik, termasuk perubahan hukum pajak, namun juga disebabkan oleh penelitian empiris dan pengembangan teori yang muncul sebagian besar pada masa-masa pembentukan (1930-1946) yang dilakukan oleh kelompok-kelompok *accounting policy making* (Chatfield, 1974). Namun yang paling *outstanding* adalah monograf yang ditulis oleh Paton dan Littleton, yang berjudul *An Introduction of Corporate Accounting Standards*, yang menggunakan pendekatan teori deduktif dan bukan menggunakan pandangan apa yang telah dilakukan oleh praktik (Paton and Littleton, 1940). Konsep yang ditulis tidak *revolutionary*, namun berupaya untuk memberikan kerangka dasar yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk *assess* praktik akutansinya. Diharapkan dengan monograf ini, ada konsistensi yang lebih tinggi dalam praktik akuntansi dibanding masa sebelumnya. Konsep penting lain pada masa itu adalah Cannings (1929) yang menghubungkan penilaian aset dengan arus kas mendatang; Sweeny (1936) dan MacNeal (1939) yang membahas tentang akuntansi untuk perubahan nilai unit moneter dan kelemahan kos historis; monograf Sanders, Hatfield, dan Moore (1938) yang memperoleh prinsip-prinsip akuntansi dari dunia praktik; Gilman (1939) tentang pengembangan konsep laba; dan Littleton (1953).

Konsep sering juga disebut dengan *postulates, axioms, assumptions, doctrines, constraints, conventions, principles, dan standards* (Wolk, 1997). Dari berbagai istilah tersebut, yang paling pas adalah konsep. Konsep adalah hasil proses identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi berbagai fenomena (Caws, 1965). Dengan demikian, konsep bukan merupakan bagian dari proses formal formulasi teori, namun dapat digunakan dalam sebuah teori sebagai bagian dari struktur postulat, atau dalam simpulan yang diperoleh dari postulat, atau bahkan sebagai subyek pengujian di dalam riset empiris. Banyak elemen yang masuk dalam kategori konsep dalam akuntansi, dan sering dimasukkan sebagai bagian

dari teori akuntansi. Sebagian telah dan akan menjadi bagian dari sebuah *general theoretical framework* untuk interpretasi dan penyajian data akuntansi (Wolk, 1997). Konsep dibagi menjadi: (1) postulat yaitu asumsi dasar tentang lingkungan bisnis, dan (2) prinsip yaitu pendekatan umum yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran peristiwa akuntansi. Prinsip dibagi lagi menjadi dua, yaitu (1) *input-oriented principles* yaitu aturan luas yang memandu fungsi akuntansi. Prinsip ini dapat dibagi lagi menjadi dua klasifikasi umum, yaitu *general underlying rules of operation*, dan *constraining principles*. (2) *output oriented principles* yang mencakup kualitas atau karakteristik tertentu yang harus dimiliki oleh statemen keuangan jika *input-oriented principles* dieksekusi secara tepat.

2.3.1. Postulat

2.3.1.1. Going concern atau Continuity

Postulat ini menetapkan bahwa kecuali ada bukti yang sebaliknya, diasumsikan bahwa perusahaan akan hidup terus sepanjang masa. Akibatnya, dalam kondisi normal, pelaporan nilai likuidasi (nilai jual) aset dan ekuitas melanggar postulat ini. Namun, asumsi kontinuitas terlalu luas sehingga tersedia banyak sekali pilihan sistem penilaian aset termasuk kos historis. Fremgen (1968) dan Sterling (1968) mengkritik postulat ini secara ekstensif. Sterling secara logis meruntuhkannya karena periode waktu kontinuitas dianggap terlalu panjang untuk menyimpulkan *contractual arrangement* perusahaan saat ini. Namun pada akhirnya persoalan ini terjawab yaitu dengan diperbarunya *arrangement* tersebut. Oleh karena itu, kontinuitas lebih sebagai prediksi dibandingkan sebagai sebuah *underlying assumption*.

2.3.1.2. Time Period

Bisnis beroperasi dalam periode waktu tertentu. Untuk entitas bisnis, *time period* adalah tahun kalender atau tahun bisnis. Menurut Horngern (2004), postulat ini merupakan upaya untuk menilai keberhasilan perusahaan dalam jangka pendek, karena jika para investor ingin mengetahui apakah perusahaan berhasil atau tidak, maka cara yang paling ekstrim adalah membubarkan perusahaan, menjual seluruh aset, melunasi seluruh utang, dan membandingkan sisanya dengan modal disetor. Jika sisanya lebih besar dibanding modal disetor, maka perusahaan dianggap berhasil, demikian pula sebaliknya. Namun tentu saja cara ini tidak akan dilakukan karena tujuan perusahaan didirikan adalah untuk jangka panjang tidak terbatas. Oleh karena itu, untuk menilai keberhasilan perusahaan, periode yang panjang tersebut dibagi ke dalam periode yang lebih pendek yang disebut periode akuntansi, sehingga perusahaan bisa menyusun laporan yang mencerminkan kinerja perusahaan untuk rentang waktu tersebut.

2.3.1.3. Accounting Entity

Postulat ini menyatakan bahwa sebuah entitas akuntansi adalah sebuah organisasi atau bagian dari organisasi yang berdiri terpisah dari organisasi atau individu lain, sebagai sebuah unit ekonomi yang terpisah. Dari perspektif akuntansi, harus ada pemisahan yang jelas sehingga tidak membingungkan kepentingan masing-masing pihak. Perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan ekonomi (*usaha*) yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan terpisah dari pemilik dan pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan. Akuntansi memandang pemilik sebagai pihak yang ada di luar perusahaan, oleh karena itu hanya transaksi atau kejadian tentang perusahaan yang

menjadi obyek akuntansi, bukan transaksi atau kejadian tentang pemilik atau penanam dana lainnya. Sebagai konsekuensi logis dari asumsi ini, adalah bahwa akuntansi harus dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pihak-pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan. Aplikasi asumsi ini dalam akuntansi adalah persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva = utang + modal.

2.3.1.4. Monetary Unit

Postulat ini menyatakan bahwa satuan pengukur yang digunakan dalam akuntansi untuk mengkuantifikasikan setiap informasi yang akan disajikan adalah satuan mata uang. Hal itu dikarenakan nilai uang mempunyai peranan yang khusus dalam perekonomian, yaitu diterima sebagai alat pengukur yang berlaku umum dalam semua pertukaran. Satuan mata uang yang dimaksud adalah satuan mata uang yang berlaku di negara tempat unit usaha yang bersangkutan beroperasi. Postulat ini didasarkan pada anggapan bahwa daya beli satuan mata uang yang digunakan adalah stabil. Perubahan daya beli yang terjadi dianggap tidak cukup penting untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian. Namun demikian asumsi ini akan menjadi semakin berkurang kegunaannya dalam hal terjadi perubahan yang cukup berarti terhadap tingkat harga-harga umum (*inflasi*). Asumsi ini sangat penting untuk dijadikan dasar pengakuan dan pengukuran setiap transaksi yang terjadi. Aplikasi dari asumsi ini adalah digunakan kos historis sebagai dasar pencatatan transaksi.

2.3.2. Principles

Terminologi prinsip dalam perkembangan akuntansi pertama kali muncul dalam *Accounting Research Study (ARS) No. 7* yang ditulis oleh Paul Grady (1965) yang menunjukkan bahwa prinsip sinonim dengan praktik. Namun pada bagian lain, Grady menyatakan prinsip sama dengan postulat yang berasal dari *experiences and reasons* yang telah terbukti bermanfaat. Selanjutnya, secara deduktif nampak bahwa prinsip adalah postulat yang telah berhasil digunakan dalam praktik. Definisi praktik yang lebih baik muncul pada *Accounting Principle Board (APB) No. 4*, yang menyatakan bahwa *Generally Accepted Accounting Principles are rooted in experience, reason, custom, usage, and... practical necessity*. (AICPA, 1970). Lebih lanjut APB No. 4 (1970) menegaskan dalam uraian tentang *pervasive principles* sebagai berikut:

.....pervasive principles are few in number and fundamental in naturepervasive principles specify the general approach accountants take to recognition and measurements of events that affect the financial position and result of operations of enterprises.

2.3.2.1. Input Oriented Principles

Prinsip akuntansi dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu: *input-oriented principles* dan *output-oriented principles* (Wolk, 1997). *Input-oriented principles* berhubungan dengan pendekatan umum atau aturan penyusunan statemen keuangan dan isinya, termasuk pengungkapan informasi pendukung lainnya. *Output-oriented principles* berhubungan dengan keterbandingan statemen keuangan antar perusahaan yang berbeda. Meskipun sebagian prinsip berhubungan dengan pihak penyusun laporan dan sebagian lagi berhubungan dengan pihak pengguna, namun prinsip-prinsip tersebut saling berhubungan.

2.3.2.1.1. General Underlying Rules of Operation

Input-oriented principles masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan sebagian lagi berhubungan dengan pengakuan

biaya. Prinsip-prinsip ini lebih berorientasi pada akuntansi kos historis untuk pengukuran laba.

2.3.2.1.1.1. Recognition

Prinsip ini mengatur tentang apa yang dimaksud dengan pendapatan, kapan pengakuan tersebut harus diakui, dan berapa besarnya pendapatan yang dapat diakui. Pendapatan adalah aliran masuk aktiva yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam suatu periode tertentu. Pada dasarnya pendapatan harus diakui pada saat pendapatan tersebut direalisasi (*realized*) atau pada saat pendapatan tersebut dapat dipastikan realisasinya (*realizable*). Realisasi pendapatan akan terjadi apabila sudah ada perpindahan hak milik (*transfer of title*) atas barang, atau sudah terjadi penyerahan jasa yang dijual. Besarnya pendapatan yang harus diakui diukur berdasarkan jumlah kas bersih atau ekuivalennya yang dapat diterima dalam suatu transaksi yang bebas.

2.3.2.1.1.2. Matching

Biaya adalah kos yang telah digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Artinya biaya diperlukan untuk menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, jika seluruh biaya dapat diidentifikasi dengan pendapatan tertentu atau periode tertentu, maka persoalan pengukuran biaya menjadi lebih mudah. Sayangnya, sebagian besar biaya tidak dapat diidentifikasi secara khusus dengan pendapatan, dan biaya tersebut juga memberikan benefit pada lebih dari satu periode akuntansi.

Proses pengakuan ekspirasi biaya (terjadinya biaya) untuk kelompok biaya seperti depresiasi, kos barang terjual, bunga, dan beban yang ditunda disebut *matching*. *Matching* berarti bahwa biaya diakui sebesar *fair and equitable basis relative to the recognition of revenues*. Dengan demikian, *matching* merupakan aspek kedua setelah pengakuan, dalam proses pengukuran laba yang berorientasi pada kos historis. *Matching* saat ini ada dalam proses kritis. Pertama, pendekatan kos historis cenderung secara substansial *understate* pengukuran biaya terkait dengan nilai *expired-asset services*. Kedua, metoda yang sistematis dan rasional yang digunakan dalam PABU cenderung bersifat *arbitrary*: persoalan khusus dapat ditangani dengan menggunakan lebih dari satu cara. Ini disebut dengan persoalan alokasi.

2.3.2.1.2. Constraining Principles

2.3.2.1.2.1. Conservatism

Kendala ini mengisyaratkan bahwa apabila terdapat lebih dari satu alternatif prinsip akuntansi yang berbeda, akuntansi lebih cenderung memilih alternatif yang tidak akan mengakibatkan aktiva dan pendapatan dilaporkan terlalu besar. Atas dasar hal ini, maka akuntansi tidak boleh mengakui adanya pendapatan dan laba yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang, sebelum pendapatan dan laba tersebut benar-benar direalisasi. Sebaliknya akuntansi mengharuskan diakui dengan segera biaya atau kerugian yang dapat diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang, walaupun biaya dan kerugian tersebut belum benar-benar terjadi. Konservatisme memiliki tempat khusus dalam etos akuntan dan sering disebut dengan *dominant principle of accounting* (Sterling, 1967; Skinner, 1988). Contoh klasik konservatisme adalah penilaian persediaan dengan metoda *lower-of-cost-or-market*. Dengan demikian, konservatisme adalah upaya untuk memilih metoda akuntansi yang berterima umum yang menghasilkan (1) pengakuan pendapatan yang lebih pelan; (2) pengakuan biaya yang lebih cepat; (3) penilaian aset yang lebih rendah; (4) penilaian utang yang lebih tinggi

(Wolk, 1997).

2.3.2.1.2.2. Disclosure

Prinsip ini menghendaki agar semua informasi yang penting atau yang akan mempengaruhi penafsiran dan pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan, diungkapkan atau di-*disclose* secara jelas dan lengkap sehingga tidak menyesatkan para pemakai laporan keuangan yang bersangkutan. Menurut APB Opinion No. 22 (APB, 1972) *disclosure* adalah informasi keuangan relevan yang ada di dalam maupun di luar statemen keuangan, termasuk berbagai metoda yang digunakan dalam statemen keuangan jika ada pilihan lebih dari satu metoda atau pemilihan metoda inovatif dan tidak biasa.

2.3.2.1.2.3. Materiality

Dua aspek materialitas berhubungan satu sama lain, namun berbeda. Dalam auditing, materialitas mencakup konsistensi *judgment* oleh auditor terhadap standar materialitas tertentu yang diterima dalam praktik akuntansi. Materialitas menyangkut pentingnya sebuah item (atau sekelompok item) bagi para pengguna informasi dalam hal relevansinya untuk mengevaluasi atau untuk pembuatan keputusan. Dalam kaitannya dengan *disclosure*, maka semua yang di-*disclose* adalah material.

2.3.2.1.2.4. Objectivity

Di masa lalu, obyektivitas telah diinterpretasikan dalam beberapa cara, namun terutama dalam hal kualitas bukti yang melandasi transaksi yang akhirnya diringkas dan diorganisasi dalam bentuk statemen keuangan (Paton and Littleton, 1940). Konsep kualitas bukti yang dipertimbangkan inilah yang akhirnya memunculkan fungsi pengukuran. Saat ini, obyektivitas lebih dilihat sebagai kesepakatan diantara para pengukur. Oleh karena itu obyektivitas merupakan bagian integral dari proses pengukuran dan bukan hanya sekedar sebuah postulat atau prinsip. APB Statement No. 4 (AICPA, 1970) mengadopsi pandangan ini meskipun mendiskusikannya konsep ini sebagai sebuah “*qualitative objective*” dan memberi nama “*verifiability*”. Selain itu Vatter (1963) adalah yang paling awal memandang bahwa obyektivitas adalah bagian dari metodologi pengukuran.

2.3.2.2. Output-Oriented Principles

Output-oriented Principles menggambarkan kualitas yang harus dimiliki oleh statemen keuangan jika dipandang dari sudut pandang penyusun laporan dan pengguna. Konsep-konsep keterbandingan, konsistensi, dan *uniformity* nampak overlap satu sama lain, namun ketiganya saling melengkapi. Keterbandingan adalah konsep yang diterapkan bagi pengguna statemen keuangan, sedangkan konsistensi dan *uniformity* fokus pada penyusun laporan keuangan.

2.3.2.2.1. Comparability

Comparability atau keterbandingan yang dipandang dari sudut pengguna adalah derajat reliabilitas yang harus ada dalam statemen keuangan ketika para pengguna mengevaluasi kondisi keuangan atau hasil operasi atau memprediksi laba atau arus kas antar perusahaan. Keterbandingan sangat tergantung pada *amount of uniformity* yang dicapai dalam pencatatan transaksi dan penyusunan statemen keuangan. Meskipun keterbandingan terkait dengan *uniformity* dalam arti semakin besar derajat *uniformity* maka semakin baik pula keterbandingan, namun pertimbangan manfaat dan kos harus diperhatikan karena semakin tinggi *uniformity* semakin besar pula kosnya.

2.3.2.2.2. Konsistensi

Konsistensi berarti penggunaan metoda akuntansi yang sama oleh sebuah perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Konsistensi dibutuhkan jika prediksi atau evaluasi yang didasarkan atas statemen keuangan perusahaan lebih dari satu periode akuntansi reliabel. Jika terjadi perubahan, karena pengadopsian metoda yang lebih relevan atau lebih obyektif, maka pengungkapan penuh (*full disclosure*) harus diberikan kepada para pengguna statemen, dan opini auditor haruslah *appropriately qualified*. Konsistensi merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan konsep *uniformity*. Sebagian meyakini bahwa perbedaan lingkungan antar perusahaan, terutama ketika industri yang berbeda dipertimbangkan, maka tidak mungkin mencapai *uniformity* teknik-teknik akuntansi dalam perusahaan (Peloubet, 1961; Kemp, 1963). Oleh karena itu konsistensi intra perusahaan dengan pengungkapan penuh jika terjadi perubahan menjadi tujuan yang paling praktis terkait dengan *output-oriented principles*.

2.3.2.2.3. Uniformity

Uniformity atau keseragaman telah dan berlanjut menjadi isu penting dalam akuntansi. Namun keseragaman memiliki beberapa aspek yang tidak selalu sepenuhnya dipertimbangkan. Interpretasi tentang keseragaman mencakup hal-hal sebagai berikut (Wolk, 1997): (1) Serangkaian prinsip akuntansi yang seragam bagi seluruh perusahaan, dengan interpretasi dan aplikasi diserahkan sepenuhnya kepada individu perusahaan; (2) Perlakuan akuntansi yang sama diperlukan dalam situasi yang sama secara luas, mengabaikan kemungkinan perbedaan kondisi (*rigid uniformity*); (3) Perlakuan akuntansi yang sama yang mempertimbangkan kondisi ekonomi yang berbeda (*finite uniformity*). Definisi kedua dan ketiga berbeda dengan definisi yang pertama karena memperhatikan derajat *uniformity* yang masuk ke dalam interpretasi transaksi. Definisi pertama hanya menekankan kerangka teoritis yang luas sebagai dasar interpretasi transaksi.

3. PERKEMBANGAN PENDEKATAN PENYUSUNAN STANDAR

Setelah mengalami era stabilisasi dalam proses pengembangan standar akuntansi sampai dengan tahun 2000an, pengembangan akuntansi mengalami perubahan yang signifikan. Perkembangan ini diawali munculnya skandal akuntansi yang memaksa kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang yang disebut Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX 2002). SOX meminta Securities Exchange Commission (SEC) mempelajari kelayakan perubahan ke sistem pelaporan keuangan yang lebih *principle-based* (Nelson, 2003), dan FASB mengusulkan perubahan yang dirancang untuk menciptakan pendekatan yang lebih *principle-based* bagi penyusunan standar (FASB, 2002). Pengubahan ini tidak dilakukan dengan mudah. Akhir-akhir ini ada banyak debat mengenai apakah *principle-based accounting* akan lebih efisien dibandingkan *the popular rules-based accounting* – terutama dalam merespon berbagai skandal akuntansi seperti Enron dan Worldcom.

3.1. Rules-Based VS Principle-Based

Rules-based accounting pada dasarnya adalah serangkaian aturan rinci yang harus diikuti ketika menyusun statemen keuangan. Sebagian besar akuntan lebih menyukai penggunaan *rules-based standards*, karena ketiadaan aturan yang jelas dapat membawa mereka ke pengadilan jika *judgments* mereka tentang statemen keuangan tidak benar. Ketika ada aturan yang tegas yang harus diikuti, kemungkinan tuntutan hukum berkurang. Keberadaan serangkaian aturan dapat meningkatkan akurasi

dan mengurangi ambiguitas yang dapat memicu *aggressive reporting decisions* oleh manajemen. Meskipun demikian, kompleksitas aturan dapat menyebabkan kompleksitas yang tidak perlu dalam penyusunan statemen keuangan. *Principles-based accounting* seperti halnya prinsip akuntansi berterima umum (PABU) digunakan sebagai sebuah dasar konseptual bagi para akuntan. Serangkaian *key objectives* ditetapkan untuk menjamin pelaporan yang baik. Contoh umum diberikan sebagai pedoman dan penjelas tujuan tersebut. Meskipun sebagian aturan tidak terhindarkan, pedoman atau aturan tersebut tidak dapat digunakan untuk setiap situasi. Keuntungan utama *principles-based accounting* adalah bahwa pedoman umum tersebut praktis untuk berbagai keadaan. Persyaratan yang eksak kadang-kadang dapat memaksa para manajer untuk memanipulasi statemen guna memenuhi persyaratan tersebut. Problem utama pedoman *principles-based* adalah bahwa ketiadaan pedoman dapat menghasilkan informasi yang tidak reliabel dan tidak konsisten, sehingga mempersulit perbandingan sebuah organisasi dengan organisasi lain. Ketika memutuskan bahwa sebuah metoda akuntansi tertentu dianggap yang terbaik, maka harus pula dipastikan bahwa informasi yang disajikan dalam statemen keuangan adalah relevan, reliabel, dan dapat dibandingkan baik antar periode maupun antar entitas.

3.2. Kajian Kritis *Rules-Based VS Principle-Based*

3.2.1. *Rules-Based VS Principle-Based* Pada Standar Akuntansi Sekarang

Pada bulan September 2002, FASB mengeluarkan sebuah *discussion paper* untuk memperoleh masukan mengenai perlunya pengembangan standar akuntansi di Amerika Serikat beralih dari pendekatan *rule-based* menuju pendekatan *principle-based*, yang sering diasosiasikan dengan International Accounting Standard Board (IASB). Pertanyaan kritisnya adalah mengapa FASB perlu beralih ke pendekatan *principle-based*?. Schipper (2003) menyatakan bahwa standar pelaporan keuangan di Amerika Serikat secara umum berdasarkan pada prinsip-prinsip, yang berasal dari kerangka konseptual FASB, namun standar tersebut juga mengandung elemen – seperti skop dan perlakuan perkecualian dan pedoman implementasi rinci - yang membuat mereka nampak seperti *rule-based*. Dalam papernya, Schipper mendiskusikan pengaruh keterbandingan, relevansi, dan reliabilitas elemen-elemen *rules-based* tersebut dengan fokus pada pengaruh pedoman implementasi rinci. Menurut Schipper (2003) pedoman rinci dimaksudkan untuk mencapai keterbandingan. Oleh karena itu, pengadopsian *principle-based* yang notabene tidak dilengkapi dengan pedoman rinci akan mengorbankan aspek keterbandingan informasi akuntansi. Nelson (2003) menyatakan hal yang senada bahwa

Because U.S. accounting standards typically are written to operationalize the FASB's underlying conceptual framework, they are based on principles. The standards also provide guidance as to correct accounting or disclosure treatment, so they include rules.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebuah 'standar' berisi prinsip-prinsip dan *rules* yang diterapkan untuk sebuah isu akuntansi tertentu.

Simpulan di atas juga didukung oleh Nobes (2005) yang menyatakan bahwa salah satu alasan mengapa standar akuntansi untuk beberapa topik berisi *rules* adalah bahwa standar tersebut tidak konsisten dengan kerangka konseptual. Untuk beberapa topik, penggunaan beberapa prinsip yang tepat dapat berakibat komunikasi yang lebih jelas dan lebih presisi tanpa membutuhkan *rules*. Nobes (2005) mengidentifikasi enam topik dimana standar akuntansinya mengandung *detailed technical rules*. Dalam enam topik di atas, umumnya kebutuhan *rules* disebabkan ketiadaan prinsip atau

penggunaan prinsip yang tidak tepat. Ketiadaan prinsip yang tidak tepat dan jelas juga berakibat adanya pilihan metoda akuntansi dalam standar karena tidak ada kebijakan yang jelas-jelas benar, sehingga berakibat tidak adanya keterbandingan.

3.2.2. Akuntansi Lease Accounting dengan Pendekatan *Rules-Based* dan *Principles-Based*

The International Accounting Standards Board (IASB) menggunakan pendekatan *principles-based* untuk penyusunan standar. Dengan demikian, standar mereka memberikan sebuah perbandingan dengan pendekatan yang dilakukan oleh FASB. Akuntansi untuk leases dengan pendekatan *principles-based* diatur dalam 6 *pronouncements* IASB dan 1 interpretasi. Sebaliknya, PABU Amerika Serikat yang berhubungan dengan akuntansi lease terdiri atas 20 *Statements*, 9 *FASB Interpretations*, 10 *Technical Bulletins*, dan 39 *EITF Abstracts*. Kedalaman *coverage* PABU Amerika Serikat terhadap leases adalah karakteristik sistem akuntansi *rules-based* di Amerika Serikat.

Akuntansi untuk leases terutama diatur dalam *International Accounting Standard 17* (IAS 17). Standar ini memberikan pedoman luas tentang klasifikasi kontrak lease sebagai *capital* atau *operating*. IAS 17 yang *principles-based* ini menetapkan hanya bahwa sebuah lease “*is classified as a finance (i.e., capital) lease if it transfers substantially all of the risks and rewards incident to ownership*” kepada *lessee*. IAS 17 tidak memberikan sebuah peluang untuk menulis kontrak yang menghindari persyaratan minimum. Jika substansi lease tersebut adalah *capital*, property tersebut harus dicatat sebagai aset dan utang pada pembukuan *lessee*. Intinya, dengan IAS 17 sulit bagi perusahaan untuk menulis kontrak lease yang membolehkan pembiayaan *off-balance-sheet*.

SFAS 13, yang merupakan standar utama untuk akuntansi lease dalam PABU Amerika Serikat, adalah contoh sebuah standar *rules-based*. SFAS 13 membolehkan upaya untuk memaksa perusahaan untuk mengakui *the substance over the form* persetujuan leasing. Secara khusus, selama tahun 1980an, banyak perusahaan mulai menggunakan mekanisme leasing sebagai alat pendanaan *off-balance-sheet*. Misalnya, sebuah perusahaan akan membeli sebuah peralatan, kemudian menjualnya ke perusahaan lain, dan selanjutnya menyewa peralatan tersebut untuk menghindari pencatatan aktiva tetap dan utang untuk peralatan tersebut. SFAS 13 menghendaki bahwa perusahaan membedakan antara *operating* dan *capital leases* menggunakan empat kriteria. Jika sebuah kontrak memuaskan salah satu dari empat kriteria tersebut, maka lease harus diakui sebagai sebuah *capital lease* dalam statemen keuangan. FASB berhadapan bahwa dengan memberikan aturan yang eksplisit, judgment individu akan dieliminasi dan standar akan diterapkan secara konsisten. Dalam beberapa kasus, strategi ini gagal bahkan menjadi boomerang (*backfired*). Karena adanya *precise rules* yang ditetapkan, maka perusahaan secara hati-hati menstrukturkan kontrak lease agar masuk dalam kualifikasi sebagai *operating leases*. Akibatnya, aturan eksplisit tersebut membolehkan berlanjutnya pendanaan *off-balance-sheet* dan memberikan justifikasi bagi perlakuan tersebut.

Meskipun kasus lease di atas nampak sedikit menunjukkan kelemahan standar FASB yang lebih kental dengan *rules-based* dan sebaliknya menunjukkan kelebihan standar IASB yang *principles-based*, namun sebagaimana dikemukakan oleh Schipper (2003) yang mengasumsikan bahwa *comparability* atau *consistency* dalam pelaporan keuangan merupakan hal yang baik. Selanjutnya Schipper (2003) dan Nelson (2003) berpendapat bahwa *rules* dapat membantu dengan memperjelas *comparability*. Namun, Nobes (2005) berpendapat bahwa beberapa *rules* dalam standar sekarang ini ada karena sebuah standar didasarkan atas sebuah *poor principle* atau karena ketiadaan *principle*. Penggunaan lebih banyak prinsip yang *appropriate* akan mengurangi kebutuhan *arbitrary* dan *detailed rules*.

3.2.3. Kelebihan *Rules-Based*

Rules-based menurut Schipper (2003) memiliki beberapa keuntungan antara lain: (1) meningkatkan keterbandingan; (2) meningkatkan keterujian bagi auditor dan regulator; (3) mengurangi peluang dilakukannya manajemen laba melalui judgment, meskipun dapat pula meningkatkan manajemen laba melalui strukturisasi transaksi; dan (4) memperbaiki komunikasi penyusun standar akuntansi.

3.2.4. Kelebihan dan Kelemahan *Principles-Based*

Menurut *Shortridge dan Myring (2003)* kelebihan utama akuntansi *principles-based* adalah pada pedoman luas yang dapat diterapkan pada berbagai situasi. Prinsip-prinsip luas menghindari kesulitan terkait dengan *precise requirements* yang membolehkan kontrak ditulis secara khusus untuk memanipulasi tujuan. Penyesiaan pedoman luas ini dapat memperbaiki *representational faithfulness* statemen keuangan. Selain itu, standar akuntansi *principles-based* memungkinkan akuntan untuk menerapkan *professional judgment* dalam meng-*assess* substansi sebuah transaksi. Pendekatan ini secara substansial berbeda dengan pendekatan *rules-based*. Keunggulan ketiga sistem *principles-based* adalah bahwa sistem tersebut akan menghasilkan standar yang lebih sederhana. Prinsip akan lebih mudah dipahami dan diterapkan untuk berbagai transaksi (*broad range of transactions*). Keuntungan terakhir, penggunaan standar akuntansi *principles-based* bisa memberikan statemen akuntansi yang lebih akurat merefleksikan kinerja sebenarnya sebuah perusahaan karena kenaikan dalam standar akuntansi *principle-based* akan mengurangi manipulasi *rules*.

Disisi lain, pendekatan *principles-based* juga mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan pertama adalah bahwa ketiadaan *precise guidelines* dapat menciptakan inkonsistensi dalam penerapan dalam berbagai perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan diminta untuk mengakui sebuah biaya dan sebuah utang untuk sebuah *contingent liability* yang masuk dalam golongan *probable* dan *estimable*. Di sisi lain, sebuah *contingent liability* yang masuk dalam kategori *reasonably possible* hanya dilaporkan dalam *footnotes*. Dengan tidak adanya *precise guidelines*, bagaimana perusahaan dapat menentukan apakah utang masuk dalam kategori *probable* atau hanya *reasonably possible*? Ketiadaan *bright-line standards* bisa mengurangi *comparability* dan *consistency*, aturan utama dalam akuntansi keuangan.

Sebagian akuntan lebih menyukai standar *rules-based*, barangkali karena kekhawatiran terhadap potensi litigasi terhadap *judgment* yang harus mereka lakukan karena ketiadaan *bright-line rules*. Permintaan akan pedoman implementasi yang diterima oleh FASB selalu tinggi, dan menyebabkan perlunya dibentuk *the Emerging Issues Task Force*. Jika statemen keuangan sesuai dengan *accepted rules*, maka dasar untuk melakukan tuntutan hukum otomatis menurun.

3.2.5. Masa Depan Akuntansi *Principles-Based*

Pada bulan Oktober 2002, FASB mengeluarkan sebuah proposal mengenai sebuah pendekatan *principles-based* untuk penyusunan standar akuntansi. Proposal tersebut mendiskusikan tujuan akuntansi keuangan dan bagaimana sebuah pendekatan *principles-based* akan membantu mencapai tujuan tersebut. Proposal tersebut juga memberikan sebuah *outline* bagi konversi ke pendekatan *principles-based*, yang mencakup tiga prioritas, yaitu (1) rerangka konseptual sekarang yang memberikan pedoman bagi standar, telah diyakini oleh FASB sebagai “*incomplete, internally inconsistent, and ambiguous*.” Sebagai contoh, SFAC No. 2 (FASB, 1980) mendiskusikan kualitas relevansi dan reliabilitas, namun FASB tidak memberikan pedoman untuk menyeimbangkan satu sama lain.

Contoh lain, prinsip pengakuan pendapatan, yang ada dalam SFAC No. 5 (FASB, 1984) sering tidak konsisten dengan definisi aset dan utang dalam SFAC No. 6 (FASB, 1985). Karena adanya kelemahan dalam kerangka konseptual, maka langkah pertama dalam penetapan sebuah sistem *principles-based* adalah memperbaiki konsep akuntansi dan mengembangkan seluruh kerangka pelaporan.

Kedua, jumlah *exceptions* yang ada dalam standar harus dikurangi. Sebagian besar rincian dalam standar berupa tiga jenis *exceptions*: *scope*, transisi, dan aplikasi. *Scope* memungkinkan pengguna standar sebelumnya berlanjut ketika sebuah standar baru diadopsi. Transisi mengurangi pengaruh perubahan standar baru. Aplikasi dimaksudkan untuk memperoleh hasil akuntansi yang diinginkan. Sebagai contoh, untuk mengurangi volatilitas biaya pensiun, estimasi return pada aktiva tetap lebih digunakan dibanding return yang sebenarnya. Meskipun *scope* dan *transition* masih akan terjadi, FASB telah mengusulkan penghapusan *application exceptions* dalam sebuah sistem *principles-based*. Pengurangan dalam *exceptions* akan mengurangi dalam jumlah besar rincian dan kompleksitas standar dan secara lebih jelas merefleksikan peristiwa ekonomi sebuah entitas.

Ketiga, jumlah pedoman interpretatif dan implementasi untuk standar akan dieliminasi dalam perpindahan ke pendekatan *principles-based*. Perubahan ini menghadapi berbagai kesulitan karena FASB telah menerima banyak sekali permintaan agar dibuat pedoman implementasi dari konstituenya. Maksud pedoman interpretatif dan implementasi tersebut adalah untuk meningkatkan *comparability* antar entitas pelaporan. Namun, dalam tahun-tahun terakhir, jumlah pedoman mengalami kenaikan secara substansial. Dengan demikian, FASB harus memutuskan apa pedoman yang tepat dan berapa banyak pedoman tersebut harus dibuat agar tidak terlalu banyak.

4. SIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan terutama tentang perubahan dari *rules-based* menjadi *principles-based* dalam penyusunan standar akuntansi di Amerika Serikat, yaitu sebagai berikut. Pertama, pada dasarnya standar akuntansi yang selama ini dibuat oleh FASB sebagian sudah memiliki sifat *principle-based*, namun sebagian lagi memiliki sifat *rules-based*. Kedua, standar akuntansi yang memiliki sifat *rules-based* diyakini karena tidak mengandung prinsip atau mengandung prinsip yang keliru, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dengan menggunakan pedoman implementasi dan sejenisnya. Ketiga, *principles-based* mengandung kelemahan utama yaitu tidak bisa menghasilkan statemen keuangan yang memiliki daya banding dengan perusahaan lainnya dan cenderung tidak konsisten. Keempat, dari sudut pandang akuntan, ternyata para akuntan lebih menyukai *rules-based* karena mereka dapat terhindar dari upaya tuntutan hukum sebagai akibat judgment yang salah dalam pelaporan keuangan. Kelima, upaya untuk berpindah dari *rules-based* ke *principles-based* tidak dapat berjalan dengan lancar, karena konstituen FASB masih menghendaki agar FASB membuat pedoman implementasi

REFERENSI

- American Institute of Certified Public Accountants. 1970. "Basic Concepts and Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises". *APB Statement No. 4*. American Institute of Certified Public Accountants, pp. 9057 – 9106.
- Caws, P. 1965. *The Philosophy of Science*. D. Van Nostrad Company, Inc.
- Chatfield, M. 1974. *A History of Accounting Thought*. The Dryden Press.
- Financial Accounting Standard Board. 1980. "Qualitative Characteristics of Accounting Information". *Statement of Financial Accounting Concept No. 2* (FASB)
- _____. 1984. "Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises". *Statement of Financial Accounting Concept No. 5* (FASB)
- _____. 1985. "Elements of Financial Statements: A Replacement of FASB Concepts Statements No.3 (incorporating an amendment of FASB Concepts Statements No. 3)". *Statement of Financial Accounting Concept No. 6* (FASB)
- _____. 2010. "Conceptual Framework for Financial Reporting Chapter 1, The Objective of General Purpose Financial Reporting, and Chapter 3, Qualitative Characteristics of Useful Financial Information". *Statement of Financial Accounting Concept No. 8* (FASB).
- _____. 2002. *Proposal: Principle-Based Approach to U.S. Standard Setting*. File Reference No. 1125-001. Nowalk, CT: FASB
- Fremgen, J. 1968. "The Going Concern Assumption: A Critical Appraisal". *The Accounting Review*. October 1968, pp. 49-56.
- Gaa, J.C. 1988. Methodological Foundation of Standard Setting for Corporate Financial Reporting. *Studies in Accounting Research No. 28*. (American Accounting Association).
- Gilman, S. 1939. *Accounting Concept of Profit*. Ronald Press.
- Grady, P. 1965. "Inventory of Generally Accepted Accounting Principles. *Accounting Research Study No. 7*. American Institute of Certified Public Accountants.
- Horngern, Charles. T., and Walter T. Harrison, Jr. 1993. *Accounting*. Second Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Kemp, P. 1963. "Controversies on the Construction of Financial Statements". *The Accounting Review*. January, 1963; pp. 126-132.

- Kieso, Donald E. and Weygandt, Jerry J. 2006. *Intermediate Accounting*. 12th Ed. New York: John Wiley & Sons.
- Littleton, A.C. 1941. A Genealogy for 'Cost or Market'. *The Accounting Review*. June, 1941: 161-167.
- McNeal, K. 1939. *Truth in Accounting*. Scholars Book Co.
- Nelson, M.W. 2003. Behavioral Evidence on The Effects of Principle- and Rules-Based Standard. *Accounting Horizon*. American Accounting Association. Vol. 17 No. 1 March 2003, pp.91-104.
- Nobes, C.W. 2005. Rules-Based Standard and the Lack of Principles in Accounting. *Accounting Horizon*. 19 (1): pp. 25-34
- Paton, W.A. and A. S. Littleton, 1940. *An Introduction of Corporate Accounting Standards*. (American Accounting Association)
- Peloubet, M. 1961. "Is Further Uniformity Desirable or Possible?". *Journal of Accountancy*. April, 1961: pp. 35-41
- Sanders, T.H., Henry R. Hatfield, and Uderhill Moore. 1938. *A Statement of Accounting Principles*. (American Accounting Association)
- Schipper, K. 2003. Principle-Based Accounting Standard. *Accounting Horizon*. 17 (1) pp 61-72
- Shortridge, R.T. and Mark Myring. 2003. Defining Principles-Based Accounting Standards. *Working Paper*. Miller College of Business, Ball State University, Muncie, Ind.
- Skinner, R.C. 1988. The Role of Conservatism in Determining the Accounting Lives of Fixed Assets. *The International Journal of Accounting*. Spring, 1988, pp. 1-18.
- Solomons, D. 1986. The FASB's Conceptual Framework: An Evaluation. *Journal of Accountancy*. June, 1986: 114-124.
- Sterling, Robert R. 1967. "Conservatism; The Fundamental Principle of Valuation in Accounting". *Abacus*. December 1967, pp. 109-132.
- Sweeny, H.W. 1936. *Stabilized Accounting* (Holt, Rinehart, and Winston)
- Vatter. 1963. "Postulates and Principles". *Journal of Accounting Research*. Autumn, 1963, pp.179-197.
- Wolk, Harry I. and Michael G. Tearney, 1997. *Accounting Theory, A Conceptual and Institutional Approach*. Fourth Edition., Cincinnati, Ohio: South-Western College Publishing.